

Disesalkan, Pelarangan Pameran "Marsinah"

Surabaya, Kompas

Reaksi bernada penyesalan terhadap pelarangan pameran seni rupa mengesakan 100 hari tewasnya Marsinah mulai mengalir. Sam Abedo Pareno, salah seorang Ketua Presidium Dewan Kesenian Surabaya (DKS) menyatakan, pameran seni rupa kali ini sebenarnya sama saja dengan ratusan pameran lain di galeri DKS dalam 21 tahun usia DKS. Jadi tak ada alasan bagi pihak kepolisian untuk curiga atau khawatir.

"Apa salahnya seorang seniman melahirkan karya seni lantaran suatu peristiwa sosial? Itu proses kreatif yang lumrah. Sama halnya dengan cahaya rembulan mengilahi pelatuk, kasus Marsinah mengilahi seni. Seniman boleh saja mengkritik karya seni kontunstannya," tutur Sam Abedo, yang juga dikenal sebagai tokoh leader Surabaya Sam Abedo mendandani, pihaknya tetap berniat hendak menggelar karya Moeliono. Karena alasan yang diajukan polisi adalah lain, maka pihaknya akan mengajukan permohonan izin. Tapi dia juga merasa perlu untuk mengalah sikap kepolisian. "Kami khawatir, persoalan lain kali jadi salah satu hambatan kegiatan DKS. Jajangan-jangan untuk latihan karawitan, kami juga mesti minta izin," kata Sam.

Kament Kadispen Poldja Jatim, Letkol (Pol) Ahmad Rifai justru membenarkan sikap spe-

Disesalkan

rat kepolisian, yang tanggap terhadap penyelenggaraan pameran. "Itu bukan pameran seni biasa. Jelas tampak ada upaya mempolitik kasus Marsinah melalui pameran seni rupa," kata Kadispen.

Seperti diberitakan, hanya tiga jam menjelang pameran seni rupa bertema "Mengesakan 100 Hari Gugurnya Marsinah" dibuka Kamis malam (12/8) pukul 19.00 WIB, Ketua II Presidium DKS Bidang Seni Rupa, Arbiwo SU membatalkan, lantaran diminta Kapolresura Surabaya Selatan Letkol (Pol) Drs Kediri Rizal kepada Arbiwo.

Sedang, pameran itu hendak menampilkan karya Moeliono (88), seniman seni rupa komunitas, yang penyelenggaraannya dipikul bersama oleh DKS, Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Seni Rupa Komunitas (LSM YSRK) dan Komite Solidaritas Untuk Marsinah (KSUM). Moeliono dikenal sebagai seniman "seni rupa instalasi" yang melatkan seni sebagai media perjuangan kepentingan masyarakat.

Coreng muka sendiri Menurut Kadispen Poldja Jatim Letkol (Pol) Drs Ahmad Rifai, pameran itu dilarang karena sifatnya bukan lagi murni pameran seni lukis estetik, se-

(Sambungan dari halaman 1) bagaimana biasanya. Pesan yang hendak disampaikan, obyek dan tema yang dibawa, kata Rifai, sudah jelas mengesakan nada keperentingan-keperentingan tertentu.

Tampak ada usaha hendak membesar-besarkan kasus kematian Marsinah melalui kegiatan seni. Lantaran itu terjadi di depan Korsal Jendral AS, lalu terasa betapa penyelenggara telah merencanakan muka bangsa sendiri. Cara itu, menurut Kadispen, dinilai acuhilagi bagi stabilitas keamanan. "Bahwa dulu pameran-pameran di DKS tidak dilarang, karena jelas motifasinya, yaitu kegiatan seni rupa murni," ujarnya.

Akan halnya alasan eksepil pelarangan itu berupa belum dimajinkannya surat izin oleh penyelenggara. Rifai menjelaskan aturan-aturan untuk itu sudah jelas. Sebagai bentuk keramahan yang mengundangi massa manusia, yaitu harus melalui permohonan izin dari pihak aparat keamanan (Polri).

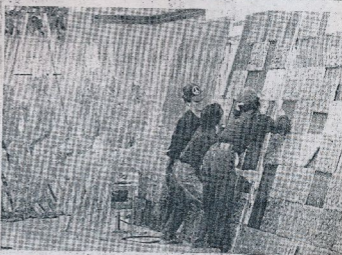
Measik LBH

Larangan pameran seni rupa Marsinah itu juga mengundang reaksi dari pihak lain. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Dr Adnan Buyung Nasu-

tion SH dan praktisi hukum Frans Hendra Winarta hari Jumat (13/8) mengesakan, kebijaksanaan polisi melarang pameran seni rupa Marsinah di Surabaya, merupakan bukti masih digunakannya pendekatan keamanan untuk mengahapi aktivitas kemasyarakatan. Sikap dan tindakan kepolisian, tegas Buyung Nasution dalam siaran pers yang dikirim ke Kompas, berbeda dengan semangat pernyataan Presiden Soeharto tentang pentingnya menjajihkan masyarakat dari ketakutan, serta penolakan atas penyelenggaraan negara kekuasaan. "Apa yang terjadi di Surabaya bukti masih kukuhnya konsep Negara Kekusaan," ujar Buyung.

Ditenggarainya, aktivitas kemasyarakatan yang dinyalakan melalui pameran seni rupa "kontekstual" seperti yang dilakukan Surabaya harus dilihat dari kemanusiaan yang ada dan beradab. Peristiwa itu berdampak tidak ditinkiri melalui hukuman penjara yang dipandang mengganggu stabilitas keamanan.

"Sebagian pejabat kepolisian kita tampaknya baru pada taraf mengkilat hak asasi manusia, belum pada pelaksanaan konkret. Saya khawatir, banyak di antara aparat keamanan kita



SENI RUPA INSTALASI - Inilah kira-kira salah satu sudut ruang Pameran Seni Rupa Instalasi Marsinah, yang rencananya digelar di gedung Dewan Kesenian Surabaya Kamis lalu. Tapi, karena tak ada izin dan dinilai mengesakan korpususana, pameran yang mengesakan solidaritas atas nasib buruh Marsinah itu akhirnya dibatalkan, karena larangan dari kepolisian.

yang sempat melupakan pendekatan keamanan dan belum memahami bagaimana hak asasi manusia itu sebenarnya," tambah Frans Hendra Winarta mengungkap keprihatinannya.

Justru aparat M Munir SH, Ketua Divisi Perubahan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya yang juga hadir pada pembekukan pameran mengesakan, LBH Surabaya lebih melihat pameran ini sebagai peristiwa seni biasa. "Dari larangan itu, terlihat justru polisi lah yang berpandangan tidak proporsional dan justru mempolitik sebuah pape-

tusen pameran seni tak pernah dimintai surat izin. "Dengan demikian lantas makin tidak jelas ke pihak mana sebenarnya aparat bersikap dalam kasus Marsinah," tandas Munir.

Rifai juga mengesakan belum berhentinya usaha Polri melacak kasus kematian Marsinah. Poldja Jatim minta kepada semua pihak memperluangkan masalah yang lebih luas, yaitu keterlibatan umum, kata Rifai. "Kami berharap warga masyarakat ikut membantu, dan jangan hanya membesar-besarkan tuntutan. Masih

tertutup rapat dan terkunci di balik larangan memotret. Namun, ketika persoalan tersebut di konfirmasi kepada Kediri, pembayanya tidak mengastahi perihal larangan. "Saya tidak tahu masalah itu," ujarnya. (ody/ibaw/bdn)

Pameran "Marsinah"

Surabaya, Kompas
Reaksi bernada penyelasan terhadap pelarangan pameran seni rupa mengesang 100 hari keawanya "Marsinah" mulai mengalir. Sam Abedo Purnomo, salah seorang Ketua Presidium Dewan Kesenian Surabaya (DKS) menyatakan, pameran seni rupa kali ini sebenarnya sama saja dengan ratusan pameran lain di galeri DKS dalam 81 tahun usia DKS. Jadi tak ada alasan bagi pihak kepolisian untuk curiga atau khawatir.

"Apa salahnya seorang seniman melahirkan karya seni lantam suatu peristiwa sosial. Itu proses kreatif yang normal. Sama halnya dengan cahaya rembulan mengilhami pelukis, kasus Marsinah mengilhami seniman Moeliono melahirkan karya seni komunikasinya," tutur Sam Abedo, yang juga dikenal sebagai tokoh teater Surabaya.

Sam Abedo meniadakan, pihaknya tetap berniat bersedia menggarai karya Moeliono. Karena alasan yang diajukan polisi adalah lain, maka pihaknya tidak mengizinkan pembaruan izin. Tapi dia juga merasa perlu untuk mengetahui sikap kepolisian. "Kami khawatir, persoalan seni kini jadi salah satu hambatan kegiatan DKS. Jenghangan untuk latihan karawitan kami juga mesti minta izin," kata Sam.

Namun Kadivjen Polda Jatim, Letkol (Pol) Ahmad Rifai justru membentangkan sikap apatis (Bersambung ke hal. 5 kol. 1-3)

terhadap penyelenggaraan pameran. "Itu bukan pameran seni biasa. Jelas tampak ada upaya mempolitisir kasus Marsinah melalui pameran seni rupa," kata Kadivjen.

Seperti diberitakan, hanya tiga jam menjelang pameran seni rupa bertema "Meninggah 100 Hari Gugurnya Marsinah" dibuka Kamis malam (12/8) pukul 19.00 WIB, Ketua II Presidium DKS Bidang Seni Rupa, Arbiwono SU membatalkan, lantaran diminta Kapolresta Surabaya Selatan Letkol (Pol) Drs Badriri Rizki kepada Arbiwono.

Sadainya, pameran itu hendak menampilkan karya Moeliono (36), seniman seni rupa komunitas, yang penyelenggaraannya dipikul bersama oleh DKS, Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Seni Rupa Komunitas (LSM YSRK) dan Komite Solidaritas Untuk Marsinah (KSUM). Moeliono dikenal sebagai seniman seni rupa instalasi yang melatinkan seni sebagai media perjuangan kepentingan masyarakat.

Coreng muka sendiri Menurut Kadivjen Polda Jatim Letkol (Pol) Drs Ahmad Rifai, pameran itu dilarang karena sifatnya bukan lagi murni pameran seni lukis estetik, se-

buah dan tema yang dibawa, kata Rifai, sudah jelas mengarah pada kepentingan-kepentingan tertentu.

Tampak ada usaha hendak membesar-besarkan kasus kematian Marsinah melalui kegiatan seni. Lantama itu terjadi di depan Konsul Jenderal AS, lalu terasa betapa penyelenggara telah mencoreng muka bangsa sendiri. Cara itu, menurut Kadivjen, dinilai sensitif bagi stabilitas keamanan. "Bahwa dulu pameran-pameran di DKS tidak dilarang, karena jelas melatinkannya, yaitu kegiatan seni rupa murni," ujarnya.

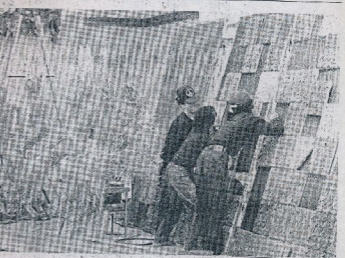
Akan halnya alasan eksplicit pelarangan itu berupa belum dimilikinya surat izin oleh penyelenggara, Rifai menjelaskan aturan-aturan untuk itu sudah jelas. Segala bentuk keramaian yang mengundangi massa memang sudah ada dalam manupia, yaitu harus melalui pemohonan izin dari pihak aparat keamanan (Polri).

Reaksi LBH Larangan pameran seni rupa Marsinah itu juga mengundang reaksi dari pihak lain. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI) Dr Adnan Buayung Nasu-

jardinian politis melarang pameran seni rupa Marsinah di Surabaya, merupakan bukti masih digunakannya pendekatan keamanan untuk menghadapi aktivitas kemasyarakatan. Sikap dan tindakan kepolisian, tegas Buayung Nasudin dalam siaran pers yang dikirim ke Kompas, berbeda dengan semangat pernyataan Presiden Soeharto tentang pentingnya menjauhkan masyarakat dari ketakutan, serta penolakan dan penyelenggaraan negara ke-luasan. "Apa yang terjadi di Surabaya bukti masih kukuhnya, konsep Negara Kekusa-an," ujar Buayung.

Ditegaskan, aktivitas kemasyarakatan yang dylakikan melalui pameran seni rupa "konkretial" seperti yang dilakukan Surabaya harus dilatih diri peapektif budaya dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Peristiwa itu hendaknya tidak dilakimi melalui kecurangan paronod yang dipandang mengganggu stabilitas keamanan.

"Sebagian pejabat kepolisian kita tampaknya baru pada taraf mengakui huk asasi manusia, belum pada pelaksanaan kon-kret. Sayu khawatir, banyak di antara aparat keamanan kita



SEMI RUPA INSTALASI — Inilah kira-kira salah satu sudut ruang Pameran Seni Rupa Instalasi Marsinah yang rencananya digelar di gedung Dewan Kesenian Surabaya Kamis lalu. Turut, karena lukis ada izin dari pihak Marsinah itu akhirnya dibatalkan, karena larangan dari kepolisian.

yang pernah melakukan pendekatan keamanan dan belum membentangi bagaimana hak asasi manusia itu sebenarnya," Lambah Prita Hindran Winarta mengungkap keprihatinannya.

Justru aparat M Munir SH, Ketua Divisi Perburuhan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya yang juga hadir pada pembaruan pameran menegaskan, LBH Surabaya lebih melihat pameran ini sebagai peristiwa seni biasa. "Dari larangan itu, terlihat justru polisi lah yang berbanding dan tidak proporsional dan justru mempolitisir sebuah pameran seni rupa," ujarnya.

Demikian pula, sikap Polresta Surabaya Selatan mengarang pameran itu dengan alasan belum adanya surat izin keramaian, jelas mengundang kecurigaan berketuhan-tuhan sejak Dewan Kesenian Surabaya (DKS) berdiri sebagai penyelenggara ra-

usan pameran seni luk pernah diminta surat izin. "Dengan demikian, lantas makin tidak jelas ke pihak mana sebenarnya aparat bersikap dalam kasus Marsinah," tandas Munir.

Rifai juga mengatakan belum terus dilakukakan permohonan izin dari pihak lain. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI) Dr Adnan Buayung Nasudin juga mengatakan belum terdapat surat izin dari pihak lain. "Kami berharap warga masyarakat ikut membantu, dan sebagai bangsa membesar-besarkan kematian Marsinah untuk kepentingan tertentu, sehingga terbentuk opini masyarakat yang bisa mengganggu ketertiban umum," ujar Rifai.

Sampai Jumat siang karya-karya seni rupa yang dipajang di galeri DKS belum dapat di bongkar. Tetapi ruang galeri

tertutup rapat dan terkemas di dalam larangan memotret. Namun, ketika persoalan tersebut di konfirmasi kepada Kadivjen, pihaknya tidak mengatibasi perihal larangan. "Saya tidak tahu masalah itu," ujarnya.

(olyd/Endasbnd)